

**SISTEM PERAN SERTA PEMERINTAH BERSAMA
MASYARAKAT DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Abizar Aris Pratama, M. Ardiansyah
Universitas Bandar Lampung
e-mail : abizar.18111028@student.ubl.ac.id

Abstrak

Posisi pemerintah lingkungan dalam memberdayakan organisasi jaringan pengendalian sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari segi akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada di Dinas Perkebunan dan Kebersihan, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan secara teknis terlibat dalam peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat untuk mengelola sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bupati atau Wakil Bupati melalui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat: (1) Regulasi (2) Dinamis (3) Fasilitator. Dan adapun faktor pendukung peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (1) aspirasi pemerintah daerah (2) dukungan masyarakat luar daerah Dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat: (1) Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (2) Ketersediaan lahan yang tidak memadai.

Kata kunci: pemerintah, masyarakat, penanganan dan pengelolaan sampah

Abstract

This looks at goals to decide the position of neighborhood governments in empowering network organizations of waste control in Tulang Bawang Barat Regency from a theoretical point of view. This research is expected to contribute to the development of government science. This research was conducted in the District of Tulang Bawang Barat, located at the Department of Plantation and Hygiene, using a qualitative research type. The research used is descriptive, and data collection uses observation and interview techniques. Data were collected from various sources, and the technique of determining informants was done by selecting informants who played a role and were technically involved in the role of local governments in empowering community groups to manage waste in Tulang Bawang Barat Regency. The Regent or Deputy Regent through the government's role in community empowerment: (1) Regulators (2) Dynamics (3) Facilitators. And as for the factors supporting the role of government in community empowerment, namely: (1) local government aspirations, (2) community support outside the region, And inhibiting factors in community empowerment: (1) Limited understanding and knowledge of the community (2) Inadequate land availability.

Keywords: government, community, handling and management waste

PENDAHULUAN

Sampah adalah bahan yang dibuang atau dibuang pada sumber yang berasal dari kegiatan manusia ataupun atas dasar proses alami yang pada dasarnya tidak memiliki nilai ekonomi lagi ataupun sudah tidak memiliki nilai guna lagi, dan dapat memiliki nilai ekonomi yang tidak baik karena tingginya biaya pembuangan atau biaya yang signifikan pada saat membuangnya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan juga saling berkesinambungan dalam hal pengelolaan sampah.

Jumlah sampah kian bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Akibatnya, sampah menjadi menumpuk dan menimbulkan masalah yang tidak pernah tuntas. Untuk mengatasinya, perlu penanganan sampah yang serius. Penanganan sampah tersebut harus dimulai dari rumah tangga hingga tempat pembuangan terakhir. Penanganan sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti penampungan, pemusnahan, pengumpulan, pembuangan, dan daur ulang. Tidak sekedar informasi tersebut, buku ini juga membahas sekilas teknis pengolahan sampah menjadi produk bermanfaat.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup akrab dengan kata sampah. Tapi apa sih arti dari sampah itu sendiri? Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dari TPS, sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik).

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing. Kegiatan penanganan sampah meliputi : pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya;

pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan tersebut berasal dari APBN dan APBD. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain.

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran masyarakat antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Sekarang saatnya kita menerapkan bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia secara garis besar. Mari bersama-sama jaga kebersihan lingkungan dengan senantiasa membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah dalam kehidupan kita sehari-hari.

Berkenaan dengan pemahaman peran, maka akan terdapat banyak pendapat berbeda yang menawarkan formulasi dan perspektif yang sangat berbeda dan juga ada yang memiliki persamaannya. Paria Westra dalam Tuti (2003:9) mengungkapkan pendapatnya bahwasanya yang dimaksudkan dengan peranan ialah sesuatu fungsi ataupun tugas mengenai sesuatu hal yang tertentu guna mendapatkan target yang telah ditetapkan. Kelompok sosial merupakan kumpulan dari manusia yang mempunyai kesadaran bersama pentingnya dan perlunya saling berinteraksi akan keanggotaan dan sesama. Dari kesadaran untuk saling berinteraksi itulah maka anggota masyarakat menciptakan sebuah kelompok. Perilaku para anggotanya dari

kelompok juga dapat dipengaruhi dari lingkupkelompok itu sendiri. Bierstedt pun mengungkapkan pendapatnya terkait kelompok, yakni kelompok memiliki banyak jenis dan dapat dibedakan atas dasar terdapat atau tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya melakukan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan atau pembuangan dari material sampah merupakan kegiatan dalam melakukan pengelolaan sampah. Adapun pengolahan sampah yang akan dikelola merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, maka untuk mengurangi dampak yang dihasilkan apabila terjadinya timbunan sampah tersebut atas kesehatan lingkungan, atau estetika maka sampah tersebut perlu dilakukan karena hal tersebut juga dapat memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Untuk melaksanakan suatu tugas bangsa setiap hatinya maka dibentuklah pemerintah. Pemerintah dijadikan sebagai wujud dari personifikasi suatu bangsa yang diharapkan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajiban serta tujuan dari bangsa untuk menjadi

nyata dan sebagai personafikasi atau upaya pemerintah ialah birokrasi pemerintah sebagai pelaksana yang berwenang. Birokrasi pemerintah tingkat pusat dikenal sebagai Departemen Luar Negeri, dan posisinya mendukung berfungsinya cabang-cabang eksekutif. Dengan kata lain, kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat.

Peningkatan kreaifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan (Ryaas Rasyid, 2017 : 45).

Menurut Pamudji (2013: 5) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan dapat diawali dengan memberikan dorongan kepada orang agar mau memainkan peran lebih aktif dalam pekerjaannya, sampai pada melibatkan mereka dalam mengambil keputusan atau tanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Berkenaan dengan pemahaman peran, maka akan terdapat banyak pendapat berbeda yang menawarkan formulasi dan perspektif yang sangat berbeda dan juga ada yang memiliki persamaannya. Pariata Westra dalam Tuti (2003:9) mengungkapkan pendapatnya bahwasannya yang dimaksudkan dengan peranan ialah sesuatu fungsi ataupun tugas mengenai sesuatu hal yang tertentu guna mendapatkan target yang telah ditetapkan. Kelompok sosial merupakan kumpulan dari manusia yang mempunyai kesadaran bersama pentingnya dan perlunya saling berinteraksi akan keanggotaan dan sesama. Dari kesadaran untuk saling berintraksi itulah maka anggota masyarakat menciptakan sebuah kelompok.

Perilaku para anggotanya dari kelompok juga dapat dipengaruhi dari lingkup kelompok itu sendiri. Bierstedt pun mengungkapkan pendapatnyaterkait kelompok, yakni kelompok memiliki banyak jenis dan dapat dibedakan atas dasar terdapat atau tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya melakukan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan atau

pembuangan dari material sampah merupakan kegiatan dalam melakukan pengelolaan sampah. Adapun pengelolaan sampah yang akan dikelola merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, maka untuk mengurangi dampak yang dihasilkan apabila terjadinya timbunan sampah tersebut atas kesehatan lingkungan, atau estetika maka sampah tersebut perlu dilakukan karena hal tersebut juga dapat memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut kamus lingkungan sampah diistilahkan sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai dan tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bereacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau dibuang (Yeti, 2002). Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Panji Nugroho, 2013). Definisi sampah menurut

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sementara menurut Purwendro & Nurhidayat, (2006) sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (dalam Siti Fatimah, 2012:10) partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan.

Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena diseleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi

(2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto, 2003:17).

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui system dalam pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang; sebagai pengetahuan atas ketersediaan fasilitas TPA bagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang; mengetahui bentuk layanan yang difasilitasi Pemerintah setempat dalam penanganan dan pengelolaan sampah; dan Untuk mengetahui bentuk *feedback* dari masyarakat dalam menjaga lingkungan dan turut berpartisipasi dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian yang dalam penelitian ini adalah jenis metode kualitatif. terdapat beberapa perspektif teoretis pada Metode kualitatif, yang dikuatkan dengan analisis yang sangat mendetail terhadap fenomena-fenomena yang telah terjadi. Bagaimanapun, riset selalu merupakan perubahan (dinamika) fenomena sosial, pengukuran numerik sulit dilakukan. Studi-studi ini memerlukan analisis yang lebih dalam dibandingkan studi kuantitatif murni yang sangat berkaitan dengan kuantifikasi data. Penelitian ini berusaha untuk memahami apa yang orang pikirkan tentang fenomena ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini, penulis menyajikan semua data yang diperoleh dengan mewawancarai responden. di bank sampah Tumijajar Daya Murni yang berhubungan dengan fungsi dari pemerintah daerah untuk melakukan edukasi bagi kelompok masyarakat pengelola sampah di Kabupaten Tubaba melakukan pengukuran variabel fungsi Pemerintah dalam pengikutsertaan masyarakat dan sebagai pemberi layanan

perihal pengolahan sampah terkait pengelolaan sampah.

Pelayanan pengelolaan sampah pemerintah merupakan upaya memajukan, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Pemerintah juga terlibat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan hasil daur ulang. Selain itu, pemerintah juga menggalakkan penerapan teknologi khusus komunitas yang sedang dikembangkan di masyarakat. , penulis menjabarkan ke dalam beberapa indikator yang di uraikan menjadi beberapa pertanyaan- pertanyaan.

Pemerintah Sebagai Regulator

Seperti halnya UPTD pengelolaan daur ulang sampah, peran pemerintah dalam pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat sangat penting karena pemerintah menyediakan fasilitas yang dimiliki oleh kawasan binaan. Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah dan merupakan keberhasilan tatanan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Diperlukan interaksi yang baik dengan

manajemen dan masyarakat, dan peran pemerintah sebagai regulator ialah melakukan penentuan arah tujuan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan dengan menerbitkan aturan. Sebagai penggerak, pemerintah menyediakan link dasar kepada masyarakat guna sarana mengatur seluruh pelaksanaan untuk melaksanakan pemberdayaan.

Pemerintah sebagai Dinamisator

Kedudukan pemerintah sebagai dinamisator ialah bagaimana pemerintah membuat pengelolaan sampah di UPTD daur ulang sampah atau biasa disebut Bank Sampah Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih bertumbuh (dinamis) dengan menggelorakan keikutsertaan masyarakat dengan cara melakukan bimbingan dan pemerdayaan kepada masyarakat. Kabid Kebersihan selaku Pembina bank sampah Desa Pulung Kencana pengelola daur ulang sampah menilai bahwa bank sampah menjadi bagian yang sangat penting dan perlu adanya pembinaan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan daur ulang sampah sehingga menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Hasil dari pengelolaan sampah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peranan pemerintah sebagai fasilitator adalah pemerintah berperan dibidang pendanaan dalam pengelolaan sampah di UPTD daur ulang sampah atau biasa disebut Bank Sampah. Hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan sampah sebagai fasilitator.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pengelola bank sampah Pulung kecana Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengapresiasi peran pemerintah dalam teknis pelaksanaan bank sampah, namun terdapat sedikit keluhan yang mereka ungkapkan bahwa masi ada beberapa alat yang memang belum mereka miliki seperti mesih pencacah plastik, mesin pencetak plastik yang tentunya jika sudah memiliki alat – alat tersebut Bank sampah tersebut akan lebih bisa berkembang.

Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah

a. Pemilihan

Pemisahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah menurut jenis, jumlah, dan/atau jenis sampah. Pemisahan sampah rumah

tangga dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pemilahan sampah bertujuan untuk memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya. Selain mempermudah pengelolaan sampah lebih lanjut, pemisahan sampah organik dan anorganik mengurangi pencemaran udara akibat menumpuknya sampah organik dan anorganik yang masih tercampur. Polusi udara dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan paru-paru dan pernapasan. Manfaat lain dari pemilahan sampah dari rumah yaitu dapat menambah nilai ekonomi dari hasil sampah yang terpilah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AM selaku masyarakat biasa ternyata kesadaran juga sudah mulai terlihat pada sikap masyarakat dalam mengelola sampah.

b. Pengumpulan

Pengumpulan dilakukan pada saat pemindahan sampah rumah tangga ke TPS dengan cara mengambilnya dari bak sampah yang ada di masing – masing rumah warga dan tak jarang pula sampah yang telah dipilah diantarkan oleh warga ke Bank sampah.

Berdasarkan Hasil Wawancara JE mengatakan bahwa proses pengumpulan sampah antara sampah basah dan sampah kering ini lebih banyak diminati oleh masyarakat dimana proses pengolahan yang jauh lebih cepat disamping itu mengenai harga juga ada perbedaan.

c. Pengangkutan

Proses dilakukan pada saat petugas kebersihan mengangkut sampah rumah tangga dari bank sampah menuju tempat penampungan sementara yang dilakukan oleh petugas kebersihan mengangkut sampah, karna merupakan syarat untuk dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Kurangnya mobil sampah yang saat ini tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat membuat kinerja petugas kebersihan kurang maksimal mengingat ada 4 TPS aktif yang jaraknya lumayan berjauhan, dampaknya mengakibatkan terkadang mobil pengangkut sampah tidak menangkut sampahnya pada hari yang telah ditentukan.

Dengan melihat perkembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kabupaten Tubaba pada umumnya, kajian ini menunjukkan beberapa faktor berpengaruh terhadap

peranan pemerintah daerah saat pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah. Faktor Pendukung yakni adanya apresiasi dari Pemerintah Daerah serta dapat langsung menjemput sampah di unit bank sampah di setiap kelurahan, Dukungan Masyarakat Setempat dan Masyarakat Luar Daerah. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini ialah Terbatasnya Pemahaman Dan Pengetahuan Masyarakat ketersediaan Lahan yang Kurang Memadai.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan tanggapan informan mengenai kiprah pemerintah wilayah pada mengelola sampah telah relatif baik tinggal ditingkatkan lagi cara mengelolanya. Peran pemerintah menjadi fasilitator pada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan & pemrosesan akhir sampah Tanggapan mengenai kiprah pemerintah pada mengelola sampah dalam pada dasarnya telah baik, terkadang terdapat acara yg

belum berjalan menggunakan baik Peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah Tanggapan informan tentang kelompok masyarakat pengelola sampah sudah berjalan dengan baik.

Peran pemerintah sebagai motor penggerak dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pengolahan sampah mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pemerintah juga berperan sebagai pengatur pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pengolahan akhir sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Arif (2012), *Peran pemerintah dalam pembinaan masyarakat* : Bandung: Alfabeta
- Bachtiar, A.M. 2002. *Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara*. Unismuh Makassar.
- Bungin, M. B. 2008. *Penelitian kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,*

- dan Ilmu Sosial Lainnya.
Jakarta: Putra Grafika.
- Friedman. M. M. 1992. Family
Nursing. Theory & Practice.
Jakarta: EGC
- Hakim, Lukman. 2010. Pemberdayaan
Masyarakat: Sketsa Teori dan
Pendekatan. Lembaga
Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah
Makassar.
- Labolo, Muhadam., 2011. Memahami
Ilmu Pemerintahan, Jakarta:
Rajawali Pers. Lembaga
Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah
Makassar.
- Jimmy, Ibrahim, 1991. Prospek Otonomi
Daerah. Semarang: Dahara
Prize. Kencana, Inu., 2002.
Sistem Pemerintahan
Indonesia, Jakarta: Rineka
Cipta.
- Rozalik Abdullah, 2007. Pelaksanaan
otonomi luas dengan pemilihan
kepala daerah secara langsung.
Jakarta : PT. Raja Grasindo.
- Sembiring, Masana., 2012. Budaya Dan
Kinerja Organisasi, Bandung:
Fokusmedia.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian
kuantitatif kualitatif dan R&D.
Bandung
- Rezky Putri Amelia Salinding, dkk
(2016), dengan judul
“Efektivitas Pengelolaan
Sampah Oleh Dinas
Kebersihan Dan Pertamanan
Kota Manado”
- Ni Wayan Eni Wirnasih, dkk (2019),
yang berjudul “Efektivitas
Pengelolaan Sampah Di Kota
Denpasar”